

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Menteri PAN dan RB RI 2. Kepala BKN RI 3. Kepala LAN RI 4. Kepala ANRI 5. Ketua KASN
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 8 Juni 2016
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: 1. Pembahasan RKA K/L APBN-P Tahun 2016 2. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015 dan Tahun 2016 (tahun berjalan)
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 30 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Rabu, 8 Juni 2016 dibuka pada pukul 10.10 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan Pembahasan RKA K/L APBN-P Tahun 2016 dan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015 dan Tahun 2016 (tahun berjalan)
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Menteri PAN dan RB RI, Kepala BKN RI, Kepala LAN RI, Kepala ANRI dan Ketua KASN untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

II. KESIMPULAN

- A. Komisi II DPR RI dapat memahami penjelasan yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pagu anggaran APBN Perubahan tahun 2016:

1. Kementerian PANRB sebesar Rp180.584.627.000,- (termasuk didalamnya adalah pagu anggaran untuk KASN sebesar Rp29.489.320.000)
2. BKN sebesar Rp555.214.115.000,-
3. LAN sebesar Rp260.219.077.000,-
4. ANRI sebesar Rp171.387.819.000,-

Dan akan membahasnya lebih lanjut pada Rapat Kerja/RDP yang akan datang, dengan mempertimbangkan kepentingan akan keberhasilan program reformasi birokrasi sekaligus semakin meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

- B. Komisi II DPR RI tidak menyetujui pemotongan anggaran BKN sebesar Rp26.677.283.500,- yang merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Keuangan No. S.377/MK.02/2016 karena akan berimbas pada pembayaran gaji pegawai BKN, serta mengamanatkan pada Anggota Badan Anggaran Komisi II DPR RI untuk menindaklanjutinya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
- C. Terhadap realisasi pelaksanaan APBN tahun 2015 (sampai dengan Desember 2015) dan realisasi tahun berjalan tahun 2016 :
1. Kementerian PANRB sebesar (70,14% pada tahun 2015) dan (30,15% s.d 3 Juni 2016)
 2. BKN sebesar (95% pada tahun 2015) dan (32,21% s.d 6 Juni 2016)
 3. LAN sebesar (91,67% pada tahun 2015) dan (30,50% s.d Mei 2016)
 4. ANRI sebesar (94,75% pada tahun 2015) dan (22% s.d 30 Mei 2016)
 5. KASN sebesar (34,03% pada tahun 2015) dan (29,22% s.d 7 Juni 2016)

Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PANRB, BKN, LAN, ANRI, dan KASN untuk segera menyampaikan laporan rincian hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun 2015 dan 2016, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program-program strategis, dan diserahkan kepada Komisi II DPR RI sebelum dimulainya pembicaraan pendahuluan APBN Tahun Anggaran 2017, termasuk juga adalah laporan atas semua catatan yang telah disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI.

- D. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PANRB, BKN, LAN, dan ANRI yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun 2015.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.15 WIB.

Jakarta, 8 Juni 2016
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

ttd
Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
A-39

